

TESIS

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG NEGERI DI KABUPATEN
MALUKU TENGAH**



THOMAS HAVYE WATTIMENA
No. Mhs : 135201987/PS/MIH



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2015**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : THOMAS HAVYE WATTIMENA
 Nomor Mahasiswa : 135201987/PS/MIH
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Judul Tesis : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap
 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006
 Tentang Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah


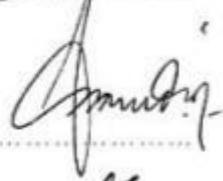

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.	15/1/2015	
Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.	12/1/2015	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : THOMAS HAVYE WATTIMENA
 Nomor Mahasiswa : 135201987/PS/MIH
 Konsentrasi : Hukum Tata Negara
 Judul Tesis : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap
 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006
 Tentang Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah

Nama Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum (Ketua)	27 - Januari 2015	
Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum (Anggota)	26 - 1 - 2015	
Dr. G. Sri Nurhatanto, S.H., LL.M. (Anggota)	26 Jan 2015	

Ketua Program Studi

 Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thomas Hayve Wattimena

No. Mhs : 135201987

Alamat : Jl. Proklamasi, Nomor 18 Tabakbayan, Kelurahan Catur
Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini, dengan judul Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Januari 2015

Yang menyatakan

Thomas Hayve Wattimena

ABSTRAKSI

Penelitian yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri di Kabupaten Maluku Tengah ini difokuskan pada permasalahan antara lain: mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala pengawasan terhadap implementasi Perda Negeri. Penulis tertarik pada judul tersebut karena ingin mengetahui kinerja para wakil rakyat (DPRD) yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, serta difasilitasi mewah dari uang rakyat dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap implementasi Perda Negeri yang dirasakan selama ini tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Negeri, dan mengupayakan solusi guna menyelesaikan kendala-kendala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta mengkajinya dari perspektif teori demokrasi, teori desentralisasi, teori pengawasan dan teori kearifan lokal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2006 tentang Negeri di kabupaten Maluku tengah belum dilaksanakan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yaitu berkaitan dengan wilayah kabupaten Maluku tengah yang merupakan daerah kepulauan sehingga mempersulit akses transportasi dan rentan kendali yang cukup jauh antar wilayah serta tidak secara eksplisit diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan. (3) Upaya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2006 tentang negeri yaitu dengan menerima masukan dari masyarakat secara tertulis, maupun lisan.

Kata Kunci : Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Implementasi, Peraturan Daerah dan Negeri.

ABSTRACT

This research entitled The Supervision of Regional House of Representatives (DPRD) towards The implementation of Regional Regulation Number 1 of 2006 on State Regional Regulation in Central Maluku (Mollucas) Regency focused on issues among others: mechanism of Regional House of Representatives supervision, obstacles facing and solution to overcome supervision obstacles towards the implementation of State Regional Regulation. The writer was interested to that title due to he/she wished to know the performance of people representatives (DPRD) who behave and on behalf of people and was also luxurious facilitated by people fund to conduct their supervision function towards the implementation of State Regional Regulation that so far conceived it did not run well.

This research was aimed to examine and to analyze the mechanism of Regional House of Representatives supervision towards the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2006 on State Regional Regulation, to know obstacles facing by House of Representatives of Central Maluku in implementing supervision towards the implementation of State Regional Regulation and to seek solutions to overcome the obstacles. This was a normative research that used legislation and also examine them from democracy, decentralization, supervision theories and local wisdom.

This research results showed that: (1) the mechanism of supervision conducted by DPRD towards the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2006 on State Regional Regulation in Central Maluku had not been implemented well in its supervision functions, (2) inhibiting factors in supervision implementation by DPRD members of Central Maluku related to Central Maluku Regency region that was an archipelago so that it complicated transportation access and rather far control range among regions and was also not explicitly regulated by legislation on supervision mechanism conducted, (3) the efforts conducted by DPRD members of Central Maluku Regency towards inhibiting factors of implementation supervision function of Regional Regulation Number 1 of 2006 on state regional regulation namely by accepting inputs from the community both written and orally.

Keywords: Supervision, Regional House of Representatives (DPRD), Implementation, Regional and State Regulations.

KATA PENGANTAR

“ Manusia adalah baik sebagai manusia apabila Dia selalu bertindak secara rasional”
(Kirdi Dipoyudo)

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada Penulis, sehingga penelitian yang berjudul **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Negeri Di Kabupaten Maluku Tengah** dapat diselesaikan. Penelitian dengan topik tersebut menarik perhatian penulis karena rasa heran dengan perkembangan negeri-negeri adat yang jauh dari tujuan otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah serta kinerja para wakil rakyat (DPRD) yang dilebel terhormat dan difasilitasi mewah dari uang rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi setiap regulasi di daerah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini tidak semata-mata merupakan usaha penulis secara personal, tetapi terlebih atas bantuan beberapa pihak yang dengan caranya yang khas dan tulus turut membantu Penulis. Penulis menyampaikan limpah terima kasih kepada:

1. Allah Tritunggal Yang Mahakudus yang senantiasa memberikan rahmat dan pancaran pencerahan kasih-Nya sehingga dapat menjiwai Penulis selama proses penelitian.
2. Ayahanda, Ibunda dan Kakak, Adik yang telah memberi bantuan memotivasi dan materi kepada Penulis dalam merampungkan penelitian ini.
3. Pimpinan Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Bapak Dr. R.Maryanto, M.A, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak Drs. M. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing utama yang dengan segala keikhlasannya, telah banyak meluangkan waktu dan pikiran memberikan bimbingan dan pencerahan kepada Penulis selama proses penelitian.
5. Ibu Dr. Woro Murdiati, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II (dua), yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pemikiran, bimbingan dan masukan yang sangat berharga dalam merampungkan penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku dosen penguji anggota, telah memberikan masukan, memperkaya dan mempertajam pemahaman Penulis mengenai isi penelitian ini.

7. Para Narasumber: Bapak Hamid Sangaji (Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah), Bapak A.S.Ohorella, S.IP (Staf bagian Pemerintahan Setda Maluku Tengah), Bapak Hamid Latarissa, S.Sos.,MP (Ketua Majelis Latupati Maluku Tengah) yang telah meluangkan waktu berbagi pengetahuan melalui pemikirannya yang tajam, sehingga memperkaya penelitian ini.
8. Pengelola Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah membantu Penulis mendapatkan jasa pustaka sehingga memperkaya sumber kepustakaan dalam penelitian ini.
9. Seluruh Dosen pada Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membentuk wawasan keilmuan di bidang hukum bagi Penulis selama mengikuti perkuliahan.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan September 2013 Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Patiung Liling, S.S., M.Hum, Jhon Sinartha Wolo, S.Fil., M.Hum, Babarlina Matulelessy, SH., M.Hum, Heronimus Bao Wolo, S.Fil., M.Hum, Iis Mardeli, SH.,M.Hum, Sally Kristen Nerani, SH , Debora Ketty Yepese, SH, dan Ones Sisinaru, SH yang telah mendukung,

menyemangati dan memberikan kontribusi yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.

11. Saudara-Saudari keluarga besar Wattimena/Leleulya : Glenn Wattimena, SH, Ingrid Wattimena, Kak Bob Pulu dan Wisye Leleulya, S.Pd, Ma Ane dan Pa Ateng Leleulya, Tante Nor Leleulya, Om Ger Hadulu dan Tanta Sar Leleulya, Abraham Leleulya, Yansen Samson.
12. Rekan-Rekan Kos TB 18, Nomor 100, Imanuel R Maran, S.Pd, Oktovianus Latuan, Adi, Agus, dan
13. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan dukungan dan bantuan guna terselesainya penelitian ini.

Akhirnya, Penulis haturkan limpah terima kasih kepada segenap pembaca yang terkasih. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belumlah sempurna dan masih membutuhkan ide-ide cermat dan kritis untuk melengkapi dan membenahinya. Karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan kritis dan ide-ide cemerlang dari pembaca sekalian, guna memperdalam dan memperkaya isi tulisan ini. Akhir kata Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dunia pendidikan.

Salam dan selamat membaca. *God Bless All...*

Penulis

Thomas Havye Wattimena

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Batasan Masalah	14
D. Keaslian Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	22
1. Manfaat Teoretis	22
2. Manfaat Praktis	23
F. Tujuan Penelitian	23
G. Landasan Teori	24
1. Teori Demokrasi	25

2. Teori Desentralisasi-----	28
3. Teori Pengawasan-----	34
4. Teori Kearifan Lokal -----	36
H. Sistematika Penulisan -----	39
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----	 41
A. Pengawasan -----	41
B. Tinjauan tentang DPRD-----	42
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD-----	42
2. Tugas dan Wewenang DPRD -----	44
3. Hak dan Kewajiban DPRD-----	46
a. Hak Anggota DPRD-----	47
b. Kewajiban Anggota DPRD-----	47
C. Tinjauan tentang Implementasi Peraturan Daerah dan Negeri -----	48
1. Implementasi -----	48
2. Peraturan Daerah-----	49
3. Pembentukan Peraturan Daerah -----	50
4. Negeri -----	51
 BAB III METODE PENELITIAN -----	 54
A. Jenis Penelitian -----	54
B. Pendekatan Penelitian -----	55
C. Data Penelitian -----	56
1. Data sekunder-----	56

a.	Bahan Hukum Primer -----	56
b.	Bahan Hukum Sekunder -----	57
2.	Metode Pengumpulan Data -----	57
a.	Kepustakaan -----	57
b.	Wawancara -----	58
D.	Analisis Data -----	58
1.	Bahan Hukum Primer -----	58
a.	Deskripsi -----	59
b.	Sistematikasi -----	59
c.	Interpretasi Hukum -----	59
d.	Menilai Hukum Positif -----	60
2.	Bahan Hukum Sekunder -----	61
E.	Proses Berpikir -----	61
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN -----	62
A.	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KABUPATEN MALUKU	
	TENGAH DAN STRUKTUR PEMERINTAHAN NEGERI -----	62
1.	Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah -----	62
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah -----	65
a.	Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan -----	79
b.	Sub bagian Otonomi Daerah dan Perangkat Daerah -----	79
c.	Sub Bagian Kerjasama Kependudukan dan Agraria -----	70
3.	Struktur Pemerintahan Negeri -----	72
a.	Struktur Organisasi -----	74
b.	Kedudukan Tugas dan Wewenang -----	75
1)	Kepala Pemerintahan Negeri -----	75
2)	Sekretaris Negeri -----	79
3)	Urusan Pemerintahan -----	80
4)	Urusan Pembangunan -----	82
5)	Urusan Umum -----	83
6)	Kepala Kampung -----	84
7)	Saniri Negeri -----	86

4. Majelis Latupati Kabupaten Maluku Tengah -----	88
---	----

B. MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH (DPRD) TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG NEGERI DI

KABUPATEN MALUKU TENGAH ----- 93

1. Pengawasan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah -----	93
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 -----	93
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 -----	96
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Maluku Tengah-----	98
a. Fungsi-----	98
b. Tugas dan Wewenang-----	99
3. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah -----	100
a. Anggota Komisi-----	101
b. Fraksi-Fraksi-----	105
c. Badan Legislasi -----	107
d. Badan Anggaran -----	109
e. Badan Musyawarah-----	111
f. Badan Kehormatan -----	113
4. Mekanisme Pengawasan DPRD Kabupaten Maluku Tengah terhadap Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri -----	115
5. Kearifan lokal masyarakat adat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri-----	128

C. KENDALA PENGAWASAN DPRD TERHADAP IMPLEMENTASI

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG

NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH ----- 136

1. Kendala Pengawasan Dalam Aspek Peraturan Perundang-Undangan - 136
2. Kendala Pengawasan Dalam Aspek Pelaksanaan ----- 139

D. UPAYA MENGATASI KENDALA PENGAWASAN DPRD

TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1

TAHUN 2006 TENTANG NEGERI DI KABUPATEN MALUKU

TENGAH ----- 140

1. Upaya Mengatasi Kendala Pengawasan Pada Aspek Peraturan Perundang-Undangan----- 141
2. Upaya Mengatasi Kendala Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan ----- 142

BAB V PENUTUP----- 146

A. Kesimpulan----- 146

B. Saran----- 147

DAFTAR PUSTAKA ----- 150

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penggunaan Landasan Teori	24
Tabel 2	Struktur Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.....	67
Tabel 3	Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri	74
Tabel 4	Komposisi dan Personalia Majelis Latupati Maluku Tengah	90
Tabel 5	Siklus Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.....	91
Tebel 6	Anggota Komisi.....	100
Tebel 7	Fraksi-Fraksi	105
Tabel 8	Badan Legislasi.....	107
Table 9	Badan Anggaran.....	109
Tabel 10	Badan Musyawarah.....	112
Tabel 11	Badan Kehormatan	114
Tabel 12	Tahapan Pengawasan	119